



BPPKAD

Kabupaten Cilacap

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022

**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap selama tahun 2022, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Cilacap.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format maupun substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing.

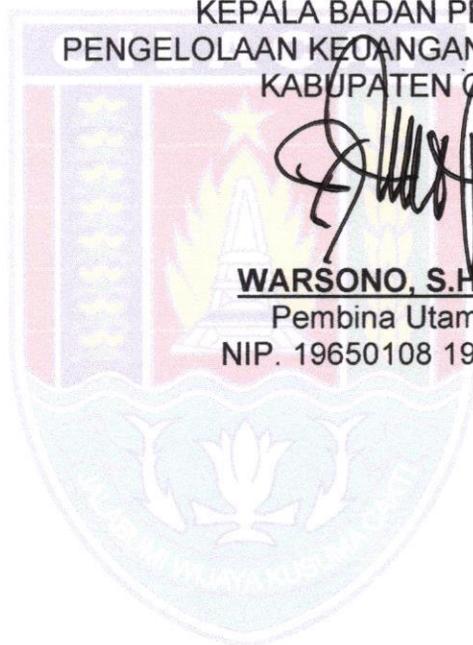
Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya secara lebih sinergis.

Cilacap, Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cilacap di tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 secara umum dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemkab Cilacap 2022.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa :

- a. **Nilai rata-rata capaian sasaran strategis** dari 2 (dua) sasaran strategis sebesar 95% dengan kategori Sangat Tinggi. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dengan 3 (tiga) indikator dikategorikan "Sangat Berhasil"
 - Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan 2 (dua) indikator dikategorikan "Sangat Berhasil"
- b. **Capaian indikator kinerja utama** dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa:
 - 3 (tiga) indikator dikategorikan "Sangat Berhasil"
- c. **Capaian indikator tujuan** dari 1 (satu) Indikator Tujuan, disimpulkan bahwa:

- 1 (satu) indikator Tujuan (100%) dikategorikan "Tercapai"

Semoga, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Cilacap yang semakin sejahtera secara merata.



DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. SUMBER DAYA MANUSIA BPPKAD KABUPATEN CILACAP	2
2. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
1. VISI	10
2. MISI	10
3. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA	11
4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	14
D. INSTRUMEN GUNA Mendukung PENGELOLAAN KINERJA	16
1. e-SAKIP	16
2. e-SKP	16
3. Aplikasi-Aplikasi yang Digunakan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap ..	17
4. Inovasi-Inovasi BPPKAD Kabupaten Cilacap	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. PENGUKURAN KINERJA	22
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	22

2. Capaian Kinerja Sasaran	23
3. Capaian Kinerja Tujuan	24
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	24
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	24
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran	24
3. Capaian Indikator Kinerja Tujuan	27
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	27
D. AKUNTABILITAS ANGGARAN	35
E. EFISIENSI SUMBER DAYA	38
BAB IV PENUTUP	39



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 Menurut Misi	11
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.....	12
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.....	13
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.....	14
Tabel 3. 1 Pengukuran dengan Skala Ordinal	23
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	24
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022	25
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran dengan Kondisi Tahun 2020 dan 2021	25
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD 2022	26
Tabel 3. 6 Rata-Rata Capaian Strategis Tahun 2022	26
Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022.....	27
Tabel 3. 8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	27
Tabel 3. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.....	32
Tabel 3. 10 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	37
Tabel 3. 12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Status Jabatan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap	2
Gambar 1. 2 Grafik Tingkat Pendidikan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap.....	2
Gambar 1. 3 Grafik Kepangkatan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap	3
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Cilacap.....	4
Gambar 2. 1 Aplikasi e-SAKIP	16
Gambar 2. 2 Aplikasi e-SKP	16
Gambar 2. 3 Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)17	
Gambar 2. 4 Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)	18
Gambar 2. 5 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Daerah (SISMIOP) 19	
Gambar 2. 6 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	20
Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Capaian Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan.....	28
Gambar 3. 2 Grafik Perbandingan Capaian Prosentase Nilai Aset yang Dapat Diamankan	31
Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Nilai AKIP SKPD	33
Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Nilai SKM	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

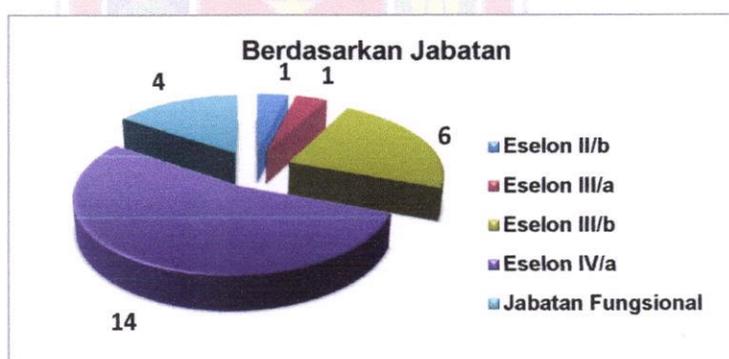
Oleh karenanya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2022.

1. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya manusia yang beragam. Jumlah PNS tahun 2022 seluruhnya sebanyak 92 orang yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 57 orang dan PNS perempuan sebanyak 35 orang. Menurut status jabatan, tingkat pendidikan, dan kepangkatan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

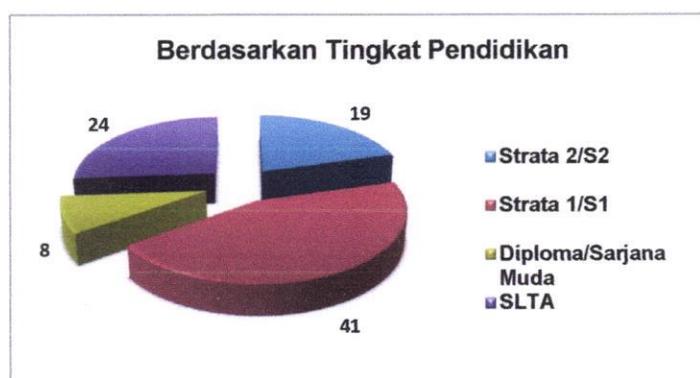
Eselon II/b	: 1 orang
Eselon III/a	: 1 orang
Eselon III/b	: 6 orang
Eselon IV/a	: 14 orang
Jabatan Fungsional	4 orang



Gambar 1. 1 Grafik Status Jabatan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

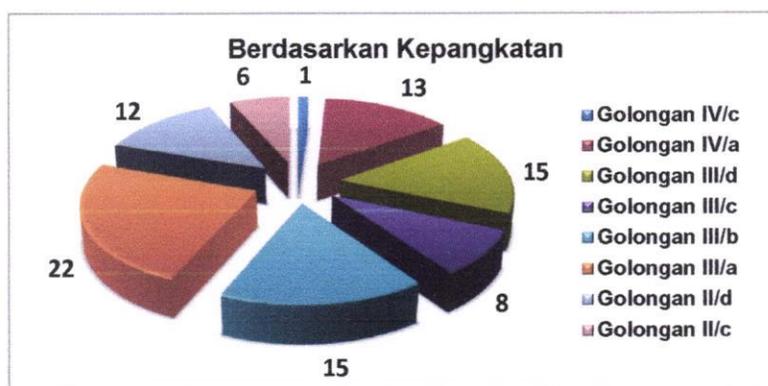
Strata 2/Magister	: 19 orang
Strata 1/Sarjana	: 41 orang
Diploma/Sarjana Muda	: 8 orang
SLTA	: 24 orang



Gambar 1. 2 Grafik Tingkat Pendidikan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap

c. Berdasarkan Kepangkatan

Golongan IV/c	: 1 orang
Golongan IV/a	: 13 orang
Golongan III/d	: 15 orang
Golongan III/c	: 8 orang
Golongan III/b	: 15 orang
Golongan III/a	: 22 orang
Golongan II/d	: 9 orang
Golongan II/c	: 6 orang

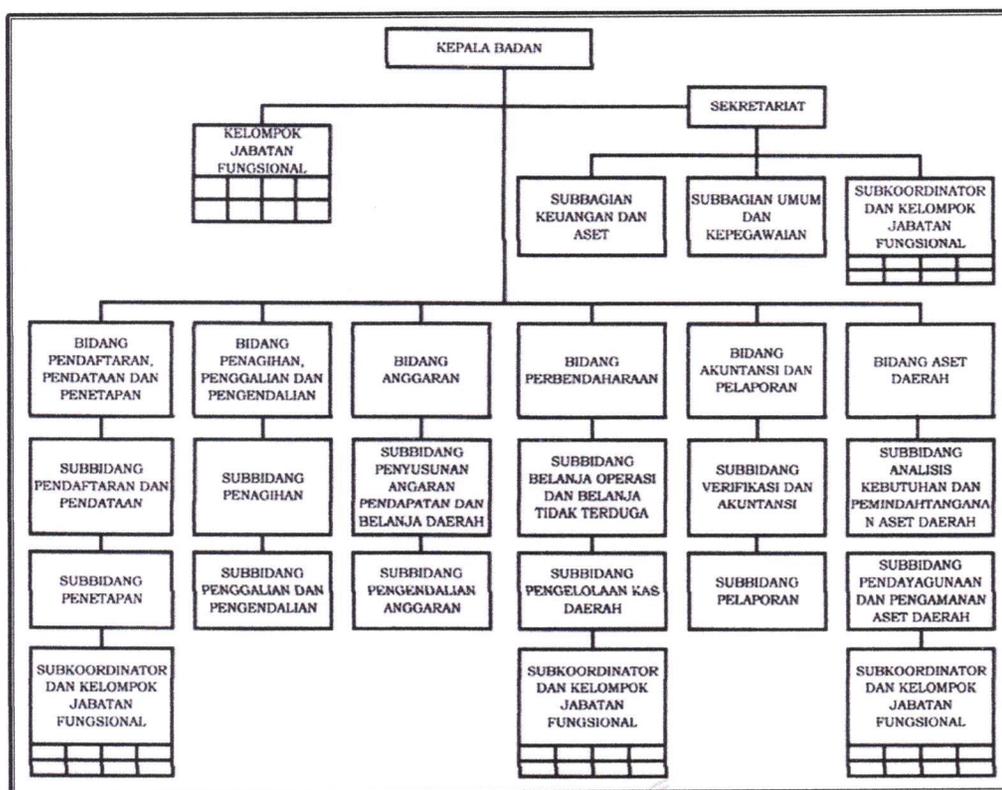


Gambar 1. 3 Grafik Kepangkatan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap

2. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP
(PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 166 TAHUN 2021)**



Gambar 1. 4 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja Badan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Merumuskan kebijakan di Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah berdasarkan rencana strategis badan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengkoordinasikan kebijakan di Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
- d. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- e. Menyelenggarakan kebijakan di Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah
- f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan,

- Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah
- g. Merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - h. Menyelenggarakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - i. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan/penatausahaan investasi, aset daerah kabupaten, pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum daerah (BLUD)
 - k. Menyelenggarakan pengelolaan dan pelaporan dana transfer
 - l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - m. Menyelenggarakan fungsi Perbendaharaan Umum Daerah;
 - n. Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan badan dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian.
 - o. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTB dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan di Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
 - p. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
 - q. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - r. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan

- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagai alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Kabupaten Cilacap Tahun 2022 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan;
5. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dan Prestasi/Penghargaan yang diraih.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan perangkat daerah dalam kerangka sistem pembangunan daerah, maka seluruh perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan strategis yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2017-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Selain itu, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap juga menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis sangat diperlukan oleh masing-masing perangkat daerah karena dengan adanya rencana strategis akan membantu perangkat daerah dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Di samping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai

secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 beserta program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

1. VISI

Visi adalah suatu pandangan yang terdapat pada organisasi atau lembaga yang mempunyai pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, Visi Pembangunan Kabupaten Cilacap adalah:

“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”

“Bangga Mbangun Desa”.

2. MISI

Misi adalah mendeklarasikan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi atau lembaga dalam mewujudkan visi. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memiliki 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah, antara lain:

- a. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan *Good Governance* dan *Clean Government*;
- c. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- d. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional; dan

- e. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari misi-misi yang telah ditetapkan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat pada misi ke-2 (dua) yaitu “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis yang mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance*”.

3. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cilacap sebagaimana berikut seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 Menurut Misi

Misi ke-2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat <i>entrepreneur</i> dan dinamis yang mengedepankan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Governance</i>			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan
			Opini BPK
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan
			Nilai AKIP SKPD
			Nilai SKM

Adapun indikator kinerja utama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap seperti terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	$\frac{\text{Total realiasi PAD}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$
		Opini BPK	Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun (n-1)
		Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	$\frac{\text{Jumlah aset yang diamankan}}{\text{Jumlah aset keseluruhan}} \times 100\%$

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap 2017-2022.

Terdapat 4 (empat) isu strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisis SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah

kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah
- c. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*
- d. Peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan
- e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah
- f. Peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKT Tahun 2022 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, maka upa pencapaianya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2022. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	1 = WTP 2 = WDP 3 = Disc.	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	%	19,9
						Opini BPK	1 = WTP 2 = WDP 3 = Disc.	1
						Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	%	100
						Nilai AKIP SKPD	Nilai	77
						Nilai SKM	Poin	79,5

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKT Tahun 2022 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran program kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Aksi Penggunaan Anggaran Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun 2022 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja disajikan pada lampiran Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

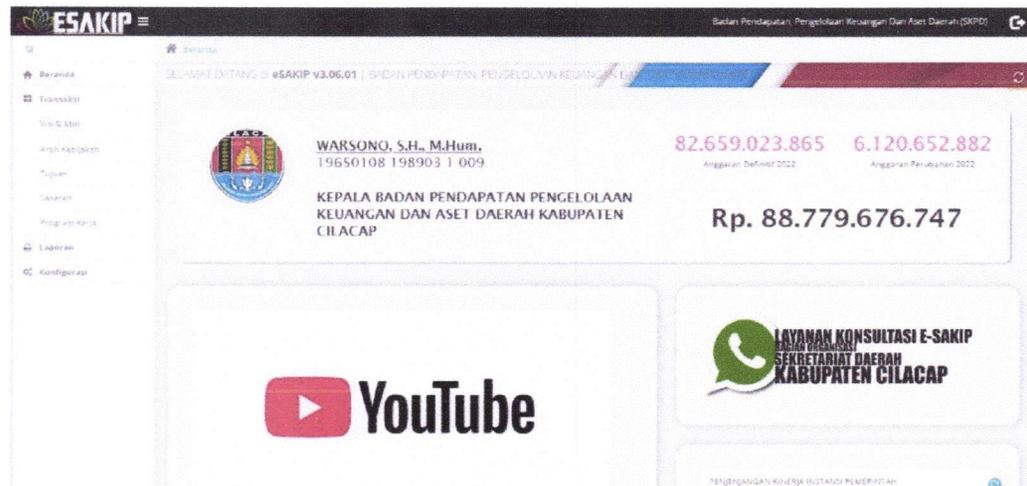
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	7.244.342.300
		Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	1.452.219.650

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran (Rp)
				Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pencairan Dana	441.907.900
				Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	763.073.175
		Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatnya Tertib Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah yang Akuntabel	8.543.605.200
2.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah.	Nilai AKIP SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	38.812.500
		Nilai SKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu dan Akuntabel	23.500.555.085
				Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	28.736.016.500
				Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	11.938.491.555

D. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

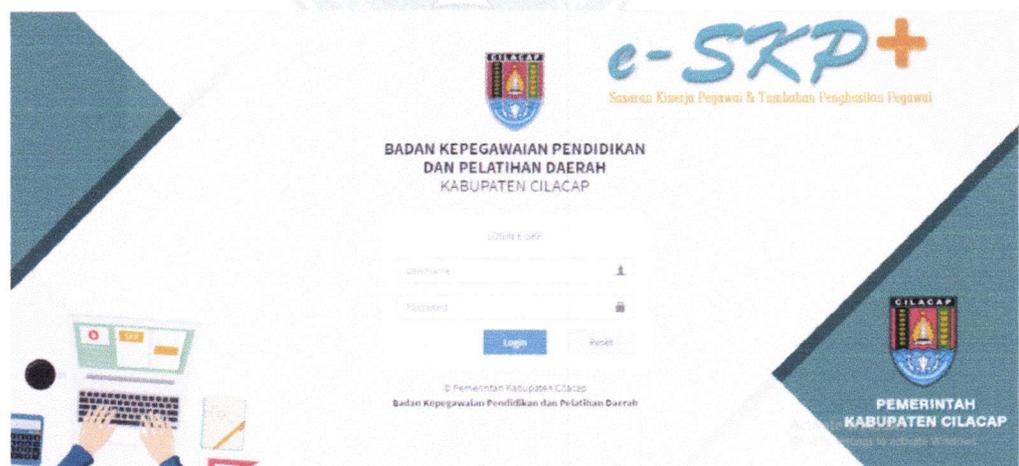
1. e-SAKIP



Gambar 2. 1 Aplikasi e-SAKIP

e-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap pada umumnya.

2. e-SKP



Gambar 2. 2 Aplikasi e-SKP

e-SKP adalah sistem elektronik SKP yang dirancang untuk pengolahan data dan penilaiannya. Melalui e-SKP, setiap SKPD dapat menyelenggarakan penilaian SKP secara elektronik dengan sasaran setiap pegawai di SKPD masing-masing.

3. Aplikasi-Aplikasi yang Digunakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

a. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)



Gambar 2. 3 Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

Program aplikasi yang digunakan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Adapun output aplikasi ini antara lain:

i. Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

ii. Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

iii. Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

b. Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)



Gambar 2. 4 Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Program aplikasi yang digunakan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pengelolaan barang daerah meliputi penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi barang daerah. Adapun output aplikasi ini antara lain:

i. Penatausahaan

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

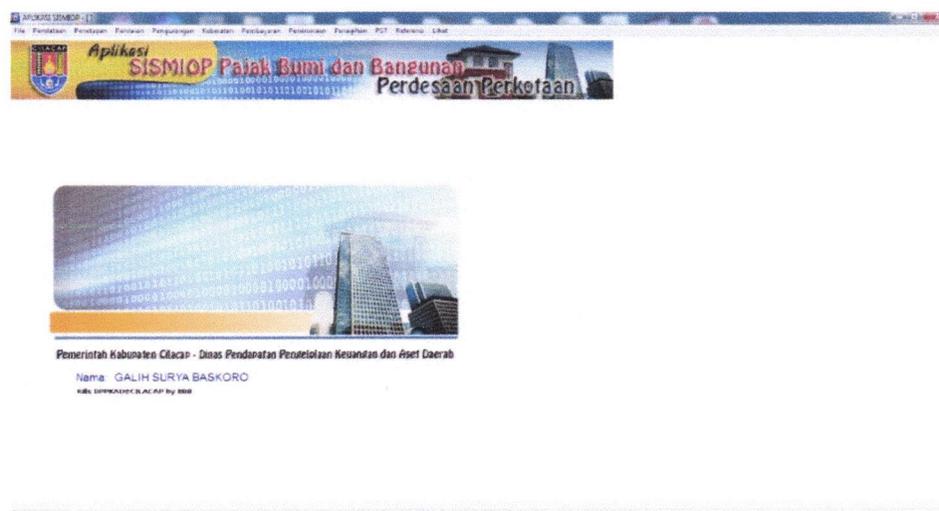
ii. Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan

iii. Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extra Comptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang per SKPD.

c. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)



Gambar 2. 5 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Daerah (SISMIOP)

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah “Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.”

SISMIOP atau Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.

d. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)



Gambar 2. 6 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) adalah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi *server-client* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

SIMPATDA merupakan sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang dapat membantu mengolah informasi dasar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen-instrumen untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pungutan PAD. Aplikasi SIMPATDA dikembangkan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Inovasi-Inovasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian visi dan misi adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan

prosedur, sarana prasarana dan profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan keterpaduan pelayanan prima. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah pasal 5 ayat (2) Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Dengan mengacu pada berbagai peraturan tersebut, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap berupaya meningkatkan pemberian pelayanan kepada calon penerima pensiun melalui SI-PENGSUN (Sistem Informasi Penghentian Gaji Pensiun) berbasis *website* sehingga penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang semula manual, kurang akurat, dan kurang akuntabel, dapat dilaksanakan secara *online*. Aplikasi SI-PENGSUN terintegrasi dengan Aplikasi E-Simpeg yang merupakan *database* kepegawaian, sehingga memudahkan bagi ASN untuk mengunduh dokumen pendukung pengajuan SKPP. Selain itu, aplikasi SI-PENGSUN juga terintegrasi dengan aplikasi SIMGAJI dari PT Taspen sebagai *database* penggajian, sehingga perhitungan gaji pensiun lebih akurat dan akuntabel. Aplikasi SI-PENGSUN dilengkapi dengan *manual book* dan video tutorial sehingga memudahkan bagi penggunanya, selain itu Aplikasi SI-PENGSUN memiliki fitur-fitur yang mudah dan *simple* sehingga sangat mudah dalam penggunaannya. Aplikasi SI-PENGSUN dapat diunduh di link: <https://skpp.cilacapkab.go.id/>.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2x \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna	Skala Ordinal	Predikat / Kategori
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50,1 s/d 65	Rendah
	65,1 s/d 75	Sedang
	75,1 s/d 90	Tinggi
	90,1 lebih	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54/2010

2. Capaian Kinerja Sasaran

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-Rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai *mean* setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Tinggi	: 95
Tinggi	: 82,5
Sedang	: 70
Rendah	: 57,5
Sangat Rendah	: 25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil, dan Tidak Berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator utk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

3. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian/ Kondisi 2020	Capaian/ Kondisi 2021	2022			Kategori
				Target	Realisasi	%	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
2.	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	18,72	22,17	19,9	21,24	106,73	Sangat Tinggi
3.	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	84,31	86,79	100	87,51	87,51	Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator (66,67%) dikategorikan “Sangat Berhasil” dan 1 (satu) indikator (33,33%) dikategorikan “Berhasil”.

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian/ Kondisi 2020	Capaian/ Kondisi 2021	2022			Kategori
				Target	Realisasi	%	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
2.	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	18,72	22,17	19,9	21,24	106,73	Sangat Tinggi
3.	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	84,31	86,79	100	87,51	87,51	Tinggi
4.	Nilai AKIP SKPD	76,48	76,80	77	76,80	99,74	Sangat Tinggi
5.	Nilai SKM	86,38	80,91	79,5	83,53	105,07	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator (80%) dikategorikan “Sangat Berhasil” dan 1 (satu) indikator (20%) dikategorikan “Berhasil”.

Adapun Realisasi dan Capaian kinerja Indikator Sasaran Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran dengan Kondisi Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian /Kondisi 2020	Capaian /Kondisi 2021	2022			Status Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2020	Status Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	18,72	22,17	19,9	21,24	106,73	▲	▼
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	●	●
3	Prosentase nilai aset yang diamankan	84,31	86,79	100	87,51	87,51	▲	▲
4	Nilai AKIP SKPD	76,48	76,80	77	76,80	99,74	▲	●
5	Nilai SKM	86,38	80,91	79,5	83,53	105,07	▼	▲
▲ = naik ▼ = turun ● = tetap								

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Renstra 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian /Kondisi 2020	Capaian /Kondisi 2021	Tahun 2022		Target Akhir Renstra 2022		% Realisasi 2022 terhadap Target Akhir Renstra 2022
				Realisasi	% Capaian	Target	% Target Capaian	
1	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	18,72	22,17	21,24	106,73	19,9	100	106,73
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100	100
3	Prosentase nilai aset yang diamankan	84,31	86,79	100	87,51	100	100	87,51
4	Nilai AKIP SKPD	76,48	76,80	76,80	99,74	77	100	99,74
5	Nilai SKM	86,38	80,91	83,53	105,07	79,5	100	105,07

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-Rata Data Kelompok, maka dari 5 (lima) sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rata-Rata Capaian Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator			
					Sangat Tidak Berhasil (<50)	Cukup Berhasil (65-75)	Berhasil (75-90)	Sangat Berhasil (>90)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	3	92,50	Sangat Tinggi	0	0	87,51 (1)	95 (2)
2	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	2	95	Sangat Tinggi	0	0	0	95 (2)
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis		93,75						

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 93,75% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian dari 2 (dua) sasaran strategis mengalami kenaikan dari capaian tahun 2021 sebesar 1,25%.

3. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Capaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian /Kondisi 2020	Capaian /Kondisi 2021	2022			Predikat/ Kategori
						Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tujuan, indikator kinerja tujuan di atas, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator (100%) dikategorikan "Tercapai".

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 (satu) dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori "Sangat Tinggi". Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Capaian/ Kondisi 2020	Capaian/ Kondisi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022		% Realisasi 2022 terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	% Target Capaian	
1	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	18,72	22,17	18,41	21,24	106,73	19,9	100	106,73
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100	100
3	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	84,31	86,79	100	87,51	100	100	87,51	87,51

Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

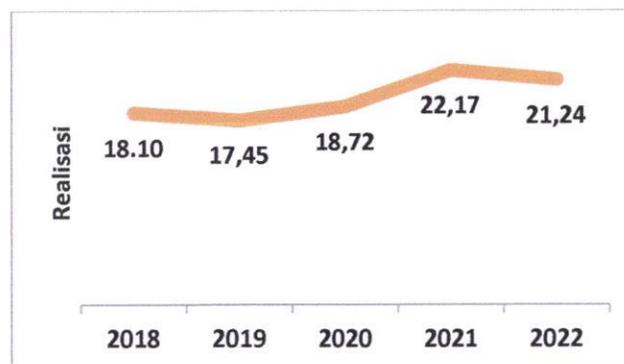
1. Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan

Prosentase PAD terhadap total pendapatan merupakan prosentase terhadap total realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan tahun 2022 dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Adapun formulasi pengukuran prosentase PAD terhadap total pendapatan yaitu:

$$\text{Prosentase PAD terhadap total pendapatan} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap *Unaudited* Tahun Anggaran 2022, realisasi capaian pada total realisasi PAD sebesar Rp 700.413.996.862,02 dan anggaran pada total pendapatan sebesar Rp 3.297.814.435.223. Hal tersebut menggambarkan bahwa prosentase PAD terhadap total pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2021, dimana realisasi capaian pada total realisasi PAD sebesar Rp 739.133.833.863,79 dan anggaran pada total pendapatan sebesar Rp 3.233.576.105.032. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) jenis pajak yang tidak memenuhi target yaitu Pajak Hotel dengan target sebesar Rp 6.500.000.000, realisasi sebesar Rp 6.090.654.066 (93,70%) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target sebesar Rp 29.000.000.000, realisasi sebesar Rp 26.244.989.755 (90,50%).

Grafik perbandingan pengukuran capaian kinerja sasaran prosentase PAD terhadap total pendapatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Capaian Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan

Adapun faktor pendorong dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- a. Faktor Pendorong
 - i. Adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah
 - ii. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait pelaksanaan pemungutan PAD
 - iii. Sistem *reward* yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD
- b. Strategi
 - i. Membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPSTSP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan penertiban.
 - ii. Penilaian NJOP PBB
 - iii. Penggunaan aplikasi terintegrasi, baik dalam pelayanan, pembayaran, dan pelaporan sehingga semakin memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

2. Opini BPK

Opini BPK merupakan opini yang dikeluarkan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Realisasi indikator opini BPK dapat mencapai target yang ditetapkan Tahun 2022 sebesar 1 (WTP) dari target dalam dokumen Renstra sebesar 1 (WTP) dengan kategori Sangat Berhasil. Hal ini dikarenakan di tiap tahunnya dari realisasi tahun 2019 hingga 2022 tata kelola laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap sudah baik dan benar. Adapun faktor penghambat, pendorong, dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

- a. Faktor Pendorong
 - i. Telah dibentuknya sistem pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) komponen antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan pada masing-masing SKPD
 - ii. Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sudah mengacu standar akuntansi pemerintah dan sudah memenuhi kriteria pemeriksaan berupa pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaporan tentang pengendalian internal.

b. Strategi

- i. Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
- ii. Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- iii. Mengaplikasikan software pengelolaan keuangan yang terintegrasi di semua SKPD
- iv. Melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan barang daerah
- v. Meningkatkan SDM pengelola keuangan khususnya petugas akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
- vi. Meningkatkan koordinasi diantara pengelola keuangan dan aset di SKPD yaitu bendahara, petugas akuntansi, dan pengurus barang untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.

3. Prosentase Nilai Aset yang dapat Diamankan

Prosentase nilai aset yang dapat diamankan merupakan prosentase dari jumlah aset yang diamankan terhadap jumlah aset keseluruhan. Formulasi pengukuran prosentase nilai aset yang dapat diamankan yaitu:

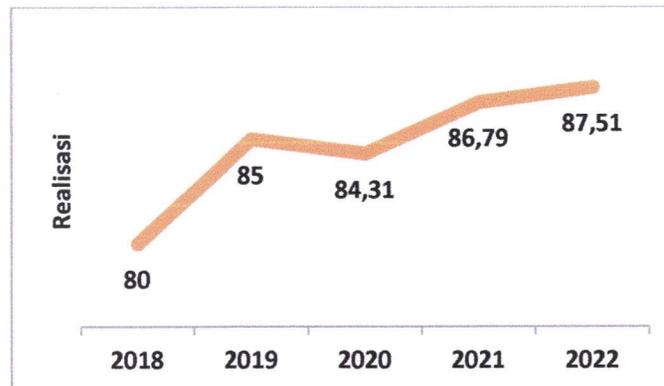
$$\text{Prosentase nilai aset yg dpt diamankan} = \frac{\text{Jumlah Aset yg Diamankan}}{\text{Jumlah Aset Keseluruhan}} \times 100\%$$

Tabel 3.9 Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap

Tahun	Total Bidang	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
2019	3.631	546	3.085
2020	4.285	782	2.849
2021	4.289	1.454	2.831
2022	4.289	1.610	2.679

Pada tahun 2022 realisasi pada aset yang bersertifikat sebesar 156 sertifikat dari total keseluruhan 4.289 sertifikat, sehingga terdapat 2.679 sertifikat yang belum tersertifikasi. Hal ini tidak tercapai sesuai target dikarenakan dalam proses pensertifikatan memerlukan waktu

yang lama dan terbatasnya pengurus barang. Grafik perbandingan pengukuran capaian kinerja sasaran prosentase nilai aset yang dapat diamankan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 2 Grafik Perbandingan Capaian Prosentase Nilai Aset yang Dapat Diamankan

Adapun faktor penghambat, pendorong, dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

- i. Masih banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat
- ii. Sumber daya manusia pengurus barang pada OPD memiliki keterbatasan kapasitas secara pengetahuan dan sering terjadi mutasi pindah/jabatan

b. Faktor Pendorong

- i. Ketersediaan anggaran yang memenuhi/mencukupi dalam rangka pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab
- ii. Adanya reward yang cukup kepada pengurus barang OPD sehingga adanya minat untuk menjadi pengurus barang OPD

c. Strategi

- i. Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengalokasikan anggaran pensertifikatan secara bertahap serta pendampingan dengan Korsupgah
- ii. Mengadakan peningkatan kapasitas pengurus barang secara berkala dan berkelanjutan serta mengadakan rekon laporan mutasi barang setiap 6 bulan sekali

Dari tabel 3.8 di atas, untuk capaian kinerja tahun 2022 pada sasaran 1 (satu) dapat tercapai 95% atau sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan segenap

karyawan/karyawati BPPKAD untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Perangkat Daerah dengan Bupati. Disamping komitmen internal yang kuat keberhasilan ini juga didukung dengan koordinasi yang maksimal antar dinas/instansi baik itu dalam hal peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 16.332.527.469 dari anggaran sebesar Rp 19.997.238.625 atau 81,67%. Dengan capaian sasaran sebesar 95% (Sangat Tinggi) dan dana yang digunakan sebesar 81,67%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,33% dan dapat dikatakan efektif.

Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 (dua) dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori "Sangat Tinggi". Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Realisasi /Kondisi 2020	Realisasi /Kondisi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022		% Realisasi 2022 terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	% Target Capaian	
1	Nilai AKIP SKPD	76,48	76,80	77	76,80	99,74	77	100	99,74
2	Nilai SKM	86,38	80,91	79,5	83,53	105,07	79,5	100	105,07

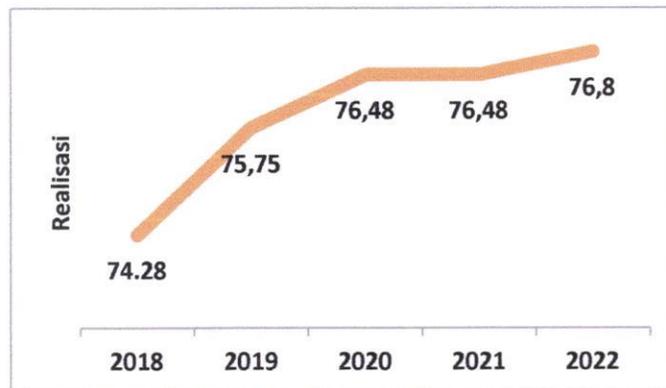
Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai AKIP SKPD

Nilai AKIP SKPD merupakan nilai yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Cilacap atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2022. Realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran nilai AKIP SKPD pada tahun 2022 menurut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Nomor LHE 700/1401/14 tanggal 29 Juni 2022 sebesar 76,80, hal ini dikarenakan pembuatan AKIP SKPD sudah melalui aplikasi sehingga mampu menyajikan dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memenuhi standar yang ditentukan.

Grafik perbandingan pengukuran capaian kinerja sasaran nilai AKIP SKPD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Nilai AKIP SKPD

Adapun faktor penghambat, pendorong, dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

- i. Pengumpulan data kinerja masih sering terlambat dan masing-masing unit kerja belum ada kesadaran menyajikan data kinerja sebelum diminta untuk pembuatan laporan
- ii. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk pemberian *reward* dan *punishment*.

b. Faktor Pendorong

- i. Target kinerja telah disusun dengan baik dan terukur
- ii. Kegiatan-kegiatan yang disusun pada dokumen Renstra mendukung capaian indikator kinerja
- iii. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan

c. Strategi

- i. Melakukan perbaikan indikator kegiatan (*output*) dan kegiatan yang lebih prioritas untuk mendukung mencapai indikator program dengan melakukan evaluasi Renstra

2. Nilai SKM

Nilai SKM adalah nilai kepuasan survei masyarakat yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat pada aplikasi SISUKMA pada tahun 2022. Formulasi pengukuran nilai SKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

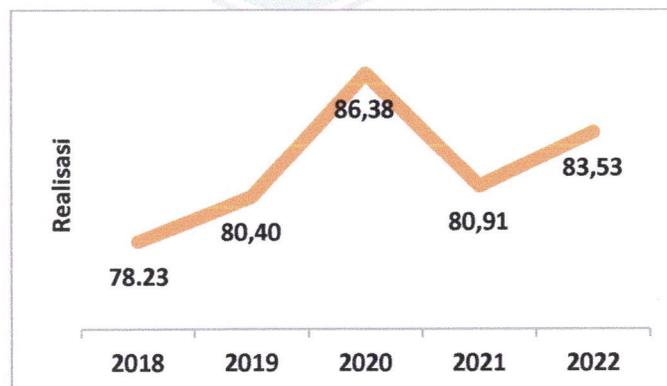
$$\text{Nilai SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran nilai SKM pada tahun 2022 sebesar 83,53 (Baik), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Responden	: 518
Laki - Laki	: 299
Perempuan	: 219

No.	Unsur Pelayanan	NRR
1.	Persyaratan	3,21
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,19
3.	Waktu Penyelesaian	3,21
4.	Biaya / Tarif	3,82
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,83
6.	Kompetensi Pelaksana	3,22
7.	Perilaku Pelaksana	3,20
8.	Penanganan Pengaduan, Saran	3,18
9.	Sarana dan Prasarana	3,22

Grafik perbandingan pengukuran capaian kinerja sasaran nilai SKM dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Nilai SKM

Adapun faktor penghambat, pendorong, dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

- a. Faktor Penghambat
 - i. Jumlah personil pelayanan terutama dalam bidang perpajakan yang sangat minim untuk melayani jumlahnya mutasi pajak
 - ii. Jumlah pengampu unit kerja pengelola barang dibandingkan dengan jumlah unit kerja pengelola barang tidak proposional
 - iii. Waktu pelayanan dan penanganan pengaduan pelayanan yang masih lambat
 - iv. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang dirasakan masyarakat masih berbelit-belit.
- b. Faktor Pendorong
 - i. Penambahan sarana prasarana dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan
 - ii. Pelayanan pajak yang bebas biaya.
- c. Strategi
 - i. Melakukan inovasi pelayanan di bidang keuangan, pendapatan, dan aset
 - ii. Melakukan penyempurnaan SOP dalam rangka percepatan pelayanan

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 63.370.357.125 dari anggaran sebesar Rp 68.782.438.122 atau 92,13%. Dengan capaian sasaran sebesar 95% (Sangat Tinggi) dan dana yang digunakan sebesar 92,13%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,87% dan dapat dikatakan efektif.

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekadar melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program, kegiatan, sub kegiatan, dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan/sub kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp 79.702.884.594 (89,78%) dari total anggaran Rp 88.779.676.747, sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 95% (Sangat Tinggi).

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja menunjukkan adanya keefektifan jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 89,78%.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berhasil melaksanakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan guna mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana tabel 3.10 berikut:

Tabel 3. 10 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Program	8	9	8	4	4
Jumlah Kegiatan	54	57	56	12	11
Jumlah Sub Kegiatan	-	-	-	46	44
Total Anggaran	72.259.214.000	79.940.271.450	79.662.077.525	76.686.738.565	88.779.676.747
Total Realisasi	67.747.577.378	71.868.119.035	62.717.912.933	66.445.522.286	79.702.884.594

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	19,9	21,24	106,73	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.023.142.700	5.363.630.379	76,37
		Opini BPK	WTP	WTP	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.685.200.725	2.561.477.836	95,39
		Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	100	87,51	87,51	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	10.288.895.200	8.407.419.254	81,71
2	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah	Nilai AKIP SKPD	77	76,80	99,74	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	38.812.500	37.529.900	96,69
		Nilai SKM	79,5	83,53	105,07	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	68.743.625.622	63.332.827.225	92,13

E. EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Anggaran		Efisiensi	
		Target	Realisasi	Rp	%
1	Prosentase terhadap pendapatan PAD total	7.023.142.700	5.363.630.379	1.659.512.321	76,37
2	Opini BPK	2.685.200.725	2.561.477.836	123.722.889	95,39
3	Prosentase nilai aset yang diamankan	10.288.895.200	8.407.419.254	1.881.475.946	81,71



BAB IV PENUTUP

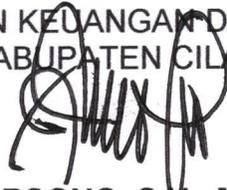
1. Analisis dan evaluasi atas 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berupaya untuk mewujudkan dan mencapai kinerja yang telah dituangkan/ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dan bertekad untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja yang akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP).
2. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 secara keseluruhan berhasil dengan **nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis** dari 2 (dua) sasaran strategis adalah **100% dengan kategori “Sangat Berhasil”**. Capaian dari 2 (dua) sasaran strategis, sebanyak 2 (dua) sasaran (100%) dengan kategori Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah dengan 3 (tiga) indikator sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi
 - b. Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan 2 (dua) indikator sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi
3. Adapun **capaian indikator kinerja utama** dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator (95%) dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Prosentase PAD terhadap total pendapatan (106,73%) dengan target 19,9% dan realisasi 21,24% dikategorikan Sangat Tinggi
 - b. Opini BPK (100%) dengan target dan realisasi WTP dikategorikan Sangat Tinggi
 - c. Prosentase nilai aset yang dapat diamankan (87,51%) dengan target 100% dan realisasi 87,51% dikategorikan Tinggi
4. **Capaian indikator kinerja tujuan** dari 1 (satu) indikator disimpulkan 1 (satu) indikator (100%) dengan kategori **“Tercapai”**. Capaian indikator kinerja tujuan opini BPK (100%) dengan target dan realisasi WTP dikategorikan Tercapai.

5. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai hasil evaluasi atas AKIP Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap (LHE SAKIP Tahun 2021 Nomor 700/1401/14 tanggal 29 Juni 2022) direkomendasikan:
 - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - i. Memaksimalkan komunikasi hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi
 - ii. Pemantauan Rencana Aksi perlu dilakukan secara periodik dan memberikan alternatif perbaikan kinerja.
6. Adapun upaya yang telah dilaksanakan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Memantau kinerja dan kegiatan perangkat daerah secara periodik
 - b. Melakukan rapat-rapat mengenai perkembangan kinerja dan kegiatan perangkat daerah.
7. Kedepan akan dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, antara lain:
 - a. Melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak
 - b. Membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPSTSP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan penertiban.
 - c. Penilaian NJOP PBB
 - d. Melakukan himbauan dan sosialisasi
 - e. Penggunaan aplikasi terintegrasi, baik dalam pelayanan, pembayaran, dan pelaporan sehingga semakin memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 - f. Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
 - g. Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

- h. Mengaplikasikan software pengelolaan keuangan yang terintegrasi di semua SKPD
- i. Melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan barang daerah
- j. Meningkatkan SDM pengelola keuangan khususnya petugas akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
- k. Meningkatkan koordinasi diantara pengelola keuangan dan aset di SKPD yaitu bendahara, petugas akuntansi, dan pengurus barang untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel
- l. Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengalokasikan anggaran pensertifikatan secara bertahap serta pendampingan dengan Korsupgah
- m. Mengadakan peningkatan kapasitas pengurus barang secara berkala dan berkelanjutan serta mengadakan rekon laporan mutasi barang setiap 6 bulan sekali
- n. Melakukan perbaikan indikator kegiatan (*output*) dan kegiatan yang lebih prioritas untuk mendukung mencapai indikator program dengan melakukan evaluasi Renstra
- o. Melakukan inovasi pelayanan di bidang keuangan, pendapatan, dan aset
- p. Melakukan penyempurnaan SOP dalam rangka percepatan pelayanan

Cilacap, Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode 2018-2022**

- Visi : "CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA" "Bangga Mbangun Desa"
- Misi : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*
- Kebijakan : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran

RENCANA STRATEGIS

No	Tujuan	Indikator Tujuan								Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun						
		Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	%	19,9	14,5	15,7	17	18,4	19,9	
		Opini BPK	1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc.	1	1	1	1	1	1		Opini BPK	1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	1	1	1	1	1	1	1
											Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	%	75	80	85	90	95	100
												Nilai AKIP SKPD	Nilai	73	74	75	76	76,5	77
												Nilai SKM	Poin	76,5	77	78	78,5	79	79,5



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode 2018-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan								Formula	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Definisi Operasional
		Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah	Opini BPK	1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	1	1	1	1	1	1	Tepat Waktu	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	Jumlah realisasi PAD dibagi total pendapatan kali 100%
												Opini BPK	Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas LKPD Kabupaten Cilacap
												Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	Jumlah aset yang diamankan dibagi jumlah aset secara keseluruhan kali 100%

Cilacap, Januari 2022



 BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI

KEPALA BADAN PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CILACAP




ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.
 NIP. 19790930 200312 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Periode 2018-2022
 Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc.	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	%	19,9
						Opini BPK	1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	1
						Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	%	100
						Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	Nilai
						Nilai SKM	Poin	79,5

Cilacap, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CILACAP





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Telepon (0282) 533461 - 521304, Faksimile 0282 - 521304
CILACAP

Kode Pos 53212

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Jabatan : BUPATI CILACAP

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilacap, Januari 2022

PIHAK KEDUA

BUPATI CILACAP



H. TATTO SUWARTO PAMUJI

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP



ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.
NIP. 19790930 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahunan		Anggaran
					Target	Satuan	
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK			1	1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc.	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	19,9	%	7.244.342.300
				Opini BPK	1	1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc.	2.657.200.725
				Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	100	%	8.543.605.200
			Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	77	Nilai	38.812.500
				Nilai SKM	79,5	Poin	64.175.063.140

Cilacap, Januari 2022



KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.
NIP. 19790930 200312 1 004

**RENCANA AKSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Keterangan
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK			1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	1	Triwulan 1		
							Triwulan 2	1	
							Triwulan 3		
							Triwulan 4		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	%	19,9	Triwulan 1	3,73	
							Triwulan 2	6,23	
							Triwulan 3	5,04	
							Triwulan 4	4,90	
				Opini BPK	1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	1	Triwulan 1		
							Triwulan 2	1	
							Triwulan 3		
							Triwulan 4		
			Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	%	100	Triwulan 1	25	
							Triwulan 2	25	
							Triwulan 3	25	
							Triwulan 4	25	
	Nilai AKIP	Nilai	77	Triwulan 1					
				Triwulan 2	77				
				Triwulan 3					
				Triwulan 4					
	Nilai SKM	Poin	79,5	Triwulan 1					
				Triwulan 2					
				Triwulan 3					
				Triwulan 4	79,5				

Cilacap, Januari 2022



KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP



**RENCANA AKSI ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode 2018-2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4						
									RP	%	RP	%	RP	%	RP	%					
									T	T	T	T	T	T	T	T					
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	%	19,9	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	142.031.450	141.431.450	99,58	-	0,00	600.000	0,42	-	0,00					
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	550.845.650	479.395.650	87,03	-	0,00	62.300.000	11,31	9.150.000	1,66					
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.093.152.000	68.687.250	3,28	1.910.960.000	91,30	113.504.750	5,42	-	0,00					
							Penagihan Pajak Daerah	252.741.200	63.620.350	25,17	27.818.500	11,01	72.760.000	28,79	88.542.350	35,03					
							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.720.580.000	537.914.250	19,77	943.093.050	34,67	931.227.800	34,23	308.344.900	11,33					
							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	633.992.000	-	0,00	450.940.000	71,13	182.712.000	28,82	340.000	0,05					
							Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	604.700.000	56.497.550	9,34	96.680.300	15,99	14.978.200	2,48	436.543.950	72,19					
							Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	246.300.000	145.108.950	58,92	12.189.350	4,95	13.032.350	5,29	75.969.350	30,84					
							Opini BPK	1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinas dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinas dan Penyusunan KUA dan PPAS	58.592.000	-	0,00	43.992.000	75,08	14.600.000	24,92	-	0,00
												Koordinas dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	63.891.200	-	0,00	49.291.200	77,15	14.600.000	22,85	-	0,00
	Koordinas dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	168.101.200	69.450.600	41,31	-	0,00						69.450.600	41,31	29.200.000	17,37						
	Koordinas dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	142.735.000	-	0,00	-	0,00						113.535.000	79,54	29.200.000	20,46						
	Koordinas dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	190.869.750	4.185.750	2,19	186.684.000	97,81						-	0,00	-	0,00						
	Koordinas dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah	828.030.500	209.798.750	25,34	204.198.750	24,66						209.734.250	25,33	204.298.750	24,67						
	Koordinas dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	127.568.300	12.592.500	9,87	55.673.800						43,64	59.302.000	46,49	-	0,00					
		Koordinas, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69.582.500	5.500.000	7,90	38.800.000						55,76	25.282.500	36,33	-	0,00					
		Koordinas Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	244.757.100	17.087.500	6,98	68.108.700						27,83	118.985.900	48,61	40.575.000	16,58					
	Koordinas dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	65.689.000	2.169.000	3,30	5.120.000						7,79	58.400.000	88,90	-	0,00					
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	237.563.800	45.550.000	19,17	108.500.000						45,67	70.400.000	29,63	13.113.800	5,52					
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	107.505.375	-	0,00	103.835.875						96,59	3.669.500	3,41	-	0,00					
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	352.315.000	128.057.500	36,35	6.498.250						1,84	51.680.000	14,67	166.079.250	47,14					
	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	%	100	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga						215.769.700	15.000.000	6,95	200.769.700	93,05	-	0,00	-	0,00	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah						113.700.000	17.137.500	15,07	5.237.500	4,61	45.537.500	40,05	45.787.500	40,27	
						Inventarisasi Barang Milik Daerah						4.450.312.500	1.048.670.625	23,56	1.061.870.625	23,86	1.236.100.625	27,78	1.103.670.625	24,80	
						Pengamanan Barang Milik Daerah						2.578.131.000	599.993.000	23,27	905.012.500	35,10	676.633.000	26,25	396.492.500	15,38	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	38.400.000	20.680.000	53,85	8.860.000	23,07	2.000.000	5,21	6.860.000	17,86						
						Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	998.698.000	194.634.000	19,49	534.511.700	53,52	204.672.800	20,49	64.879.500	6,50						
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						148.594.000	-	0,00	260.000	0,17	524.000	0,35	147.810.000	99,47							

CASCADING
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode 2018-2022

No	Tujuan							Sasaran										
	Indikator Tujuan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang							Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah										
	Opini BPK	1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	1	1	1	1	1	1	Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	19,87	14,52	15,72	17,02	18,41	19,9		
50204 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																		
50204201 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								5020420102 - Analsa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										
								<i>Sub Bidang Penggalian dan Pengendalian</i>										
No.	Indikator	Target	Pengampu				Anggaran	No.	Indikator	Target	Pengampu							
1.	Jumlah Peningkatan Realisasi Pajak	12.000.000.000 rupiah	Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian				3.038.770.300											
2.	Jumlah Peningkatan Realisasi Pajak	12.000.000.000 rupiah	Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan				4.205.572.000	1.	IKU	Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan	13 produk hukum							
									2.	IKU	Jumlah Rekon Pendapatan	4 kali						
									-	IKP	Penerbitan Produk Hukum	13 produk hukum	Analisis Laporan Keuangan					
									-	IKP	Pelaksanaan Rekon Pendapatan	4 kali	Analisis Laporan Keuangan					
								5020420103 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
								<i>Sub Bidang Penagihan</i>										
No.	Indikator	Target	Pengampu															
1.	IKU	Jumlah Pelaksanaan Gebyar Undian PBB P2					5 kali											
2.	IKU	Jumlah Sosialisasi PBB P2					5 kali											
-	IKP	Pelaksanaan Gebyar Undian PBB P2					5 kali	Analisis Penagihan										
-	IKP	Pelaksanaan Sosialisasi PBB P2					5 kali	Pengadministrasi Penerimaan										
								5020420105 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
								<i>Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan</i>										
No.	Indikator	Target	Pengampu															
1.	IKU	Jumlah Objek PBB P2 yang					60.000 objek pajak											
-	IKP	Update Data Subjek & Objek PBB P2					10.000 objek pajak	Pengadministrasi Umum										
-	IKP	Update Data Subjek & Objek PBB P2					10.000 objek pajak	Pengadministrasi Umum										
-	IKP	Update Data Subjek & Objek PBB P2					10.000 objek pajak	Pengadministrasi Umum										
-	IKP	Update Data Subjek & Objek PBB P2					10.000 objek pajak	Pengadministrasi Umum										
-	IKP	Update Data Subjek & Objek PBB P2					10.000 objek pajak	Pengadministrasi Umum										
-	IKP	Update Data Subjek & Objek PBB P2					10.000 objek pajak	Pengadministrasi Umum										
								5020420106 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										
								<i>Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>										
No.	Indikator	Target	Pengampu															
1.	IKU	Cetak Blanko DHKP PBB P2					1 paket											
2.	IKU	Cetak Blanko SPPT PBB P2					1 paket											
3.	IKU	Perpanjangan Orecl					1 lisensi											
-	IKP	Pencetakan Blanko DHKP PBB P2					1 paket	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah										
-	IKP	Pencetakan Blanko SPPT PBB P2					1 paket	Analisis Pendapatan Daerah										
-	IKP	Pelaksanaan Perpanjangan Orecl					1 lisensi	Bendahara										
								5020420107 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah										
								<i>Sub Bidang Penetapan</i>										
No.	Indikator	Target	Pengampu															
1.	IKU	Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang Dinilai					1.200.000 objek pajak											
2.	IKU	Jumlah Objek Pajak yang Dinilai Secara Individu					5 objek pajak											
-	IKP	Ketepatan PBB Tahun Berjalan					1.200.000 objek pajak	Pengadministrasi Umum										
-	IKP	Ketetapan PBB yang Dinilai secara Individu Tahun					5 objek pajak	Pengadministrasi Umum										
								5020420110 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
								<i>Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>										
No.	Indikator	Target	Pengampu															
1.	IKU	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terdistribusi SPPT dan DHKP					284 desa/kelurahan											
2.	IKU	Jumlah Kecamatan yang Terdistribusi SPPT dan DHKP					24 kecamatan											
3.	IKU	Jumlah Objek Pajak yang Diteliti					32 objek pajak											
-	IKP	Pendistribusian SPPT dan DHKP ke Desa/Kelurahan					57 desa/kelurahan	Analisis Pendapatan Daerah										
-	IKP	Pendistribusian SPPT dan DHKP ke Desa/Kelurahan					57 desa/kelurahan	Bendahara										

					2.	IKU	Jumlah Peserta Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	180 orang		190.869.750
					-	IKP	Penyusunan SK Pengelola Keuangan dan SK Penyempurnaan	30 SK	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	
					-	IKP	Pelaksanaan Pibintek Pengelolaan Keuangan Daerah	180 orang	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	
5020220111 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah										
<i>Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>										
					No.		Indikator	Target	Pengampu	
					1.	IKU	Terlaksananya Rapat-Rapat TAPD	12 bulan		828.030.500
					-	IKP	Persiapan Rapat TAPD yang Dilaksanakan	12 bulan	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	
502022020 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										
5020220203 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										
<i>Sub Bidang Belanja Modal, Belanja Transfer dan Pembiayaan</i>										
					No.		Indikator	Target	Pengampu	
	1.	Jumlah Penerbitan SP2D	7.000 lembar	Bidang Perbendaharaan						441.907.900
					No.		Indikator	Target	Pengampu	
					1.	IKU	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencairan Dana	169 dokumen		127.568.300
					-	IKP	Pelaksanaan Pencairan Dana	85 dokumen	Analisis Perbendaharaan	
					-	IKP	Pelaksanaan Pencairan Dana	84 dokumen	Pengadministrasi Umum	
5020220205 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										
<i>Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah</i>										
					No.		Indikator	Target	Pengampu	
					1.	IKU	Jumlah Dokumen Transfer Daerah dan Dana Desa	40 dokumen		69.582.500
					-	IKP	Dokumen Transfer Daerah dan Dana Desa	20 dokumen	Analisis Perbendaharaan	
					-	IKP	Dokumen Transfer Daerah dan Dana Desa	20 dokumen	Analisis Perbendaharaan	
5020220206 - Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank										
<i>Sub Bidang Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga</i>										
					No.		Indikator	Target	Pengampu	
					1.	IKU	Jumlah Peserta Pembinaan Bendahara Gaji	100 orang		244.757.100
					2.	IKU	Terbayarnya Gaji Daerah se-Kabupaten Cilacap	12 bulan		
					3.	IKU	Terbayarnya Gaji ke-13 se-Kabupaten Cilacap	1 bulan		
					4.	IKU	Terbayarnya Gaji ke-14 se-Kabupaten Cilacap	1 bulan		
					-	IKP	Pelaksanaan Pembinaan Bendahara Gaji	100 orang	Analisis Perbendaharaan	
					-	IKP	Terbayarnya Gaji Daerah se-Kabupaten Cilacap	12 bulan	Pengadministrasi Keuangan	
					-	IKP	Terbayarnya Gaji ke-13 se-Kabupaten Cilacap	1 bulan	Pengadministrasi Keuangan	
					-	IKP	Terbayarnya Gaji ke-14 se-Kabupaten Cilacap	1 bulan	Pengadministrasi Keuangan	
50202203 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										
5020220302 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
<i>Sub Bidang Pelaporan</i>										
					No.		Indikator	Target	Pengampu	
	1.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang Diteliti	178 dokumen	Bidang Akuntansi dan Pelaporan						763.073.175
					No.		Indikator	Target	Pengampu	
					1.	IKU	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang Disusun	17 dokumen		65.689.000
					-	IKP	Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang Disusun	6 dokumen	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah	
					-	IKP	Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang Disusun	6 dokumen	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah	
					-	IKP	Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang Disusun	5 dokumen	Pengelola Akuntansi	
5020220304 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										
<i>Sub Bidang Pelaporan</i>										
					No.		Indikator	Target	Pengampu	
					1.	IKU	Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah	7 dokumen		237.563.800
					-	IKP	Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 dokumen	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah	
					-	IKP	Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah	
					-	IKP	Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen	Pengelola Akuntansi	

						-	IKP	Pendistribusian SPPT dan DHKP ke Desa/Kelurahan	57 desa/kelurahan	Analisis Pendapatan Daerah	
						-	IKP	Pendistribusian SPPT dan DHKP ke Desa/Kelurahan	57 desa/kelurahan	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	
						-	IKP	Pendistribusian SPPT dan DHKP ke Desa/Kelurahan	57 desa/kelurahan	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	
						-	IKP	Pendistribusian SPPT dan DHKP ke Kecamatan	24 kecamatan	Analisis Pendapatan Daerah	
						-	IKP	Penelitian Objek Pajak yang Diteliti	50 objek pajak	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	
5020420111 - Penagihan Pajak Daerah											
<i>Sub Bidang Penagihan</i>											
						No.		Indikator	Target	Pengampu	
						1.	IKU	Fasilitasi Pelaksanaan Bidang Hukum	5 kali		
						2.	IKU	Intensifikasi Pemungutan PBB P2	10 kali		
						3.	IKU	Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2	12 kali rekon		
						4.	IKU	Tindak Lanjut Penagihan Pajak yang Tertagih	40 wajib pajak		
						-	IKP	Pelaksanaan Fasilitasi Bidang Hukum	5 kali	Analisis Penagihan dan Pengembalian	252.741.200
						-	IKP	Pelaksanaan Intensifikasi PBB P2	10 kali	Analisis Keuangan	
						-	IKP	Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2	12 kali rekon	Analisis Keuangan	
						-	IKP	Jumlah Wajib Pajak yang Ditindaklanjuti	40 wajib pajak	Pengadministrasian Penerimaan	
5020420113 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah											
<i>Sub Bidang Penggalan dan Pengendalian</i>											
						No.		Indikator	Target	Pengampu	
						1.	IKU	Jumlah Objek Pajak Daerah yang Terperiksa	12 objek Pajak		
						2.	IKU	Jumlah Alat GPS Tracker	75 buah		
						3.	IKU	Jumlah Monitoring Perakaman Data	20 wajib pajak		
						-	IKP	Objek Pajak yang Terperiksa	12 objek Pajak	Pengadministrasian Penerimaan	
						-	IKP	Pengadaan Alat GPS Tracker	75 buah	Analisis Laporan Keuangan	550.845.650
						-	IKP	Pelaksanaan Monitoring Perakaman Data	20 wajib pajak	Pengadministrasian Penerimaan	
Opini BPK						1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc.	1	1	1	1	1
50202 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
50202201 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						5020220101 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					
<i>Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>						<i>Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>					
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran		No.		Indikator	Target	Pengampu	
1.	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pengelolaan Keuangan	56 dokumen	Bidang Anggaran	1.452.219.650		1.	IKU	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 dokumen		58.592.000
						-	IKP	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	4 dokumen	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	
5020220102 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan						<i>Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>					
						No.		Indikator	Target	Pengampu	
						1.	IKU	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	4 dokumen		63.891.200
						-	IKP	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	4 dokumen	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	
5020220107 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						<i>Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>					
						No.		Indikator	Target	Pengampu	
						1.	IKU	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD	10 dokumen		168.101.200
						-	IKP	Penyusunan Dokumen APBD	10 dokumen	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	
5020220108 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD						<i>Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>					
						No.		Indikator	Target	Pengampu	
						1.	IKU	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD Perubahan	8 dokumen		142.735.000
						-	IKP	Penyusunan Dokumen APBD Perubahan	8 dokumen	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	
5020220109 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						<i>Sub Bidang Pengendalian Anggaran</i>					
						No.		Indikator	Target	Pengampu	
						1.	IKU	Jumlah SK Tindak Lanjut dan SK Pengelola Keuangan	30 SK		

5020220310 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah											
Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi											
No.	Indikator	Target	Pengampu								
1.	IKU	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 dokumen perbup								
2.	IKU	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Kebijakan Akuntansi	200 orang								
-	IKP	Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 dokumen perbup	Analisis Laporan Keuangan							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan Akuntansi	40 orang	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah		107.505.375					
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan Akuntansi	40 orang	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan Akuntansi	40 orang	Pengelola Akuntansi							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan Akuntansi	40 orang	Pengadministrasi Keuangan							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan Akuntansi	40 orang	Analisis Laporan Keuangan							
5020220311 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi											
No.	Indikator	Target	Pengampu								
1.	IKU	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Disusun	95 laporan								
2.	IKU	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru	215 orang								
-	IKP	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19 laporan	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah							
-	IKP	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19 laporan	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah							
-	IKP	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19 laporan	Pengelola Akuntansi							
-	IKP	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19 laporan	Pengadministrasi Keuangan		352.315.000					
-	IKP	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19 laporan	Analisis Laporan Keuangan							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru	43 orang	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru	43 orang	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru	43 orang	Pengelola Akuntansi							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru	43 orang	Pengadministrasi Keuangan							
-	IKP	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru	43 orang	Analisis Laporan Keuangan							
Prosentase Nilai Aset yang Diamankan					%	75	80	85	90	95	100
50203 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
50203201 - Pengelolaan Barang Milik Daerah					5020320101 - Penyusunan Standar Harga						
Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset											
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	No.	Indikator	Target	Pengampu			
1.	Jumlah Dokumen Laporan Aset/Barang Milik Daerah	685 dokumen	Bidang Aset Daerah	8.543.605.200	1.	IKU	Jumlah Peraturan Bupati tentang SSH dan ASB	2 perbup			
					-	IKP	Penyusunan Peraturan Bupati tentang SSH dan ASB	2 perbup	Pengelola Bahan Perencanaan		
5020320105 - Penatausahaan Barang Milik Daerah											
Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah											
No.	Indikator	Target	Pengampu								
1.	IKU	Jumlah Laporan BMD	358 laporan								
-	IKP	Tersedianya Laporan BMD	358 laporan	Pengadministrasi Keuangan		113.700.000					

5020320106 - Inventarisasi Barang Milik Daerah					4.450.312.500			
Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah								
No.	Indikator	Target	Pengampu					
1.	IKU Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1 dokumen						
-	IKP Penyusunan Dokumen Inventarisasi BMD	1 dokumen	Pengadministrasi Keuangan					
5020320107 - Pengamanan Barang Milik Daerah					2.578.131.000			
Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset Daerah								
No.	Indikator	Target	Pengampu					
1.	IKU Asuransi Gedung Pemerintah	60 gedung						
2.	IKU Asuransi Kendaraan Dinas	60 unit						
3.	IKU Bidang Tanah yang Dipasang Patok	30 bidang						
4.	IKU Jumlah Sertifikat Tanah Pemda Kabupaten Cilacap	400 sertifikat						
-	IKP Pembayaran Asuransi Gedung Pemerintah	60 gedung	Analisis Aset Negara					
-	IKP Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas	60 unit	Analisis Aset Negara					
-	IKP Pemasangan Patok pada Bidang Tanah	30 bidang	Pengadministrasi Umum					
-	IKP Data Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab yang akan Disertifikatkan	200 sertifikat	Analisis Aset Negara					
-	IKP Data Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab yang akan Disertifikatkan	200 sertifikat	Pengadministrasi Umum					
5020320109 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					38.400.000			
Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset Daerah								
No.	Indikator	Target	Pengampu					
1.	IKU Jumlah SK Bupati tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	13 SK						
-	IKP SK Bupati tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	13 SK	Pengelola Bahan Perencanaan					
5020320110 - Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah					998.598.000			
Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset Daerah								
No.	Indikator	Target	Pengampu					
1.	IKU Jumlah Gedung Olahraga dan Rumah Dinas yang Terpelihara dan Rehab	21 gedung						
-	IKP Pemeliharaan Gedung Olahraga dan Rumah Dinas	15 gedung	Pengadministrasi Umum					
-	IKP Pemeliharaan Gedung Olahraga dan Rumah Dinas	6 gedung	Pengadministrasi Umum					
5020320113 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					148.594.000			
Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah								
No.	Indikator	Target	Pengampu					
1.	IKU Jumlah Pengurus Barang yang Mengikuti Pembinaan	240 orang						
-	IKP Pelaksanaan Pembinaan Pengurus Barang	240 orang	Pengadministrasi Keuangan					
Sasaran								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah								
Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Nilai AKIP SKPD	Nilai	73	74	75	76	76,5	77	
50201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
50201201 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5020120101 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	Sub Bagian Perencanaan			
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 dokumen	Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.812.500	No.	Indikator	Target	Pengampu
					1.	IKU Jumlah Dokumen Rencana Kerja	3 dokumen	
					-	IKP Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	3 dokumen	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda
5020120107 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Sub Bagian Perencanaan			
No.	Indikator	Target	Pengampu					
1.	IKU Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen						
-	IKP Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran					

Nilai SKM					Poin	76,5	77	78	78,5	79	79,5
50201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
50201202 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5020120201 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian						
1.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.500.555.085	No.		Indikator	Target	Pengampu	23.500.555.085	
					1.	IKU	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan			
					-	IKP	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Analisis Organisasi		
50201206 Administrasi Umum Perangkat Daerah					5020120602 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian						
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.984.183.700	No.		Indikator	Target	Pengampu	219.830.700	
					1.	IKU	Tersedianya ATK dan Peralatan Perlengkapan Kantor	12 bulan			
					-	IKP	Data Kebutuhan Jenis dan Jumlah Alat Tulis Kantor, serta Data Kebutuhan Jenis dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Pengadministrasi Umum		
					-	IKP	Penyediaan ATK dan Peralatan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Pengadministrasi Umum		
5020120604 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Sub Bidang Umum dan Kepegawaian						
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian						
1.	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu	12 bulan			No.		Indikator	Target	Pengampu	640.290.000	
					-	IKP	Data Kebutuhan Makan dan Minum Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu	12 bulan	Penyusun Laporan Keuangan		
					-	IKP	Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu	12 bulan	Penyusun Laporan Keuangan		
5020120605 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Sub Bidang Perencanaan						
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	Sub Bidang Perencanaan						
1.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan			No.		Indikator	Target	Pengampu	324.047.000	
					-	IKP	Data Kebutuhan Jenis dan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	Pengadministrasi Umum		
					-	IKP	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	Pengadministrasi Umum		
5020120609 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Sub Bidang Umum dan Kepegawaian						
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian						
1.	Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 bulan			No.		Indikator	Target	Pengampu	800.016.000	
					-	IKP	Data Permohonan dan Undangan Mengikuti Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 bulan	Pengadministrasi Umum		
50201207 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5020120701 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset						
1.	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	825 unit	Bidang Aset Daerah	11.036.027.650	No.		Indikator	Target	Pengampu	7.030.978.450	
					1.	IKU	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Boks	2 unit			
					2.	IKU	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 3	24 unit			
					3.	IKU	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor	33 unit			
					4.	IKU	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Station Wagon	14 unit			
					-	IKP	Data Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Boks	1 dokumen	Pengelola Bahan Perencanaan		
					-	IKP	Data Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 3	1 dokumen	Pengelola Bahan Perencanaan		
					-	IKP	Data Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor	1 dokumen	Pengelola Bahan Perencanaan		
					-	IKP	Data Pengadaan Kendaraan Dinas Station Wagon	1 dokumen	Pengelola Bahan Perencanaan		
					-	IKP	Penyiapan Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Boks	2 unit	Pengelola Bahan Perencanaan		
					-	IKP	Penyiapan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 3	24 unit	Pengelola Bahan Perencanaan		
					-	IKP	Penyiapan Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor	33 unit	Pengelola Bahan Perencanaan		
					-	IKP	Penyiapan Pengadaan Kendaraan Dinas Station Wagon	14 unit	Pengelola Bahan Perencanaan		

50201208 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5020120802 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	No.	Indikator	Target	Pengampu		
1.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.751.832.800	1.	IKU	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan		24.727.295.000
					-	IKP	Data Tagihan Listrik, Air dan Telepon Kantor BPPKAD Kabupaten Cilacap	12 bulan	Penyusun Laporan Keuangan	
					-	IKP	Data Tagihan/Invoice Penerangan Jalan Umum (PJU) dari ULP Wangon, ULP Ajibarang dan UP3 Cilacap	12 bulan	Penyusun Laporan Keuangan	
					-	IKP	Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon Kantor BPPKAD Kabupaten Cilacap	12 bulan	Penyusun Laporan Keuangan	
					-	IKP	Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) dari ULP Wangon, ULP Ajibarang, dan UP3 Cilacap	12 bulan	Penyusun Laporan Keuangan	
5020120804 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5020120804 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	No.	Indikator	Target	Pengampu		
					1.	IKU	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan		2.024.537.800
					-	IKP	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Bendahara	
50201209 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5020120804 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
No.	Indikator	Target	Pengampu	Anggaran	No.	Indikator	Target	Pengampu		
1.	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	349 unit	Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	902.463.905	1.	IKU	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Dua	57 unit		426.821.155
					2.	IKU	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat	18 unit		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4			
									RP	%	RP	%	RP	%	RP	%		
									T	T	T	T	T	T				
2.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	Nilai	77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.187.500	3.287.500	13,59	-	0,00	20.900.000	86,41	-	0,00		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.625.000	1.625.000	11,11	-	0,00	13.000.000	88,89	-	0,00		
		Nilai SKM	Poin	79,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.500.555.085	5.712.467.593	24,31	6.411.212.845	27,28	5.688.437.324	24,21	5.688.437.323	24,21	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.830.700	35.163.165	16,00	62.917.695	28,62	83.802.800	38,12	37.947.040	17,26	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	640.290.000	128.030.000	20,00	224.109.000	35,00	180.117.000	25,01	128.034.000	20,00	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	324.047.000	66.824.250	20,62	66.824.250	20,62	116.824.250	36,05	73.574.250	22,70	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.016.000	159.905.000	19,99	280.006.000	35,00	200.100.000	25,01	160.005.000	20,00	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24.727.295.000	6.175.473.750	24,97	6.175.473.750	24,97	6.175.473.750	24,97	6.200.873.750	25,08
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.024.537.800	496.184.450	24,51	535.984.450	26,47	496.184.450	24,51	496.184.450	24,51
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.030.978.450	5.042.125.000	71,71	1.466.869.950	20,86	521.983.500	7,42	-	0,00
									Pengadaan Mebel	1.595.578.700	-	0,00	178.437.600	11,18	1.417.141.100	88,82	-	0,00
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.409.470.500	424.500.000	17,62	896.983.700	37,23	1.087.986.800	45,15	-	0,00
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	426.821.155	106.705.300	25,00	106.705.300	25,00	106.705.300	25,00	106.705.255	25,00
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.460.000	19.089.000	20,00	33.411.000	35,00	23.865.000	25,00	19.095.000	20,00
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.182.750	49.208.000	14,26	185.544.750	53,75	61.380.000	17,78	49.050.000	14,21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	6.750.000	19,29	13.070.000	37,34	8.436.000	24,10		6.744.000	19,27								



			-	IKP	Data Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua BPPKAD Kabupaten Cilacap	57 unit	Pengadministrasi Umum		
			-	IKP	Penyiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua BPPKAD Kabupaten	57 unit	Pengadministrasi Umum		
			-	IKP	Data Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat BPPKAD Kabupaten Cilacap	18 unit	Pengadministrasi Umum		
			-	IKP	Penyiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat BPPKAD Kabupaten	18 unit	Pengadministrasi Umum		
			5020120906 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			<i>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>						
			No.		Indikator	Target	Pengampu		
			1.	IKU	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	134 unit		95.460.000	
			-	IKP	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPPKAD Kabupaten Cilacap	134 unit	Pengadministrasi Umum		
			5020120909 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			<i>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>						
			No.		Indikator	Target	Pengampu		
			1.	IKU	Rehab Gedung Pendopo BPPKAD	1 gedung		245.588.000	
			2.	IKU	Terpeliharanya Gedung Kantor BPPKAD	7531 M2			
			-	IKP	Pemeliharaan/Rehab Gedung Pendopo BPPKAD	1 gedung	Bendahara		
			-	IKP	Pemeliharaan Gedung Kantor BPPKAD Kabupaten Cilacap	7531 M2	Bendahara		
			5020120911 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			<i>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>						
			No.		Indikator	Target	Pengampu		
			1.	IKU	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	140 unit		35.000.000	
			-	IKP	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor BPPKAD Kabupaten Cilacap	140 unit	Penyusun Laporan Keuangan		



TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
 Periode 2018 - 2022
 Tahun Anggaran 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase	KET												
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah					Faktor Penghambat : - Faktor Pendorong : 1. Telah dibentuknya sistem pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) komponen antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan pada masing-masing SKPD 2. Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sudah mengacu standar akuntansi pemerintah dan sudah memenuhi kriteria pemeriksaan berupa pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan pelaporan tentang pengendalian internal.												
		Satuan	Target Tahunan																		
		WTP = 1; WDP = 2; Disc. = 3								1											
		Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan								I	3,73	3,78	101,34	Faktor Penghambat : - Faktor Pendorong : 1. Adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah. 2. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait pelaksanaan pemungutan PAD. 3. Sistem reward yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD.							
		Satuan	Target Tahunan							II	6,23	6,47	100								
		%	19,9							III	5,04	4,75	94,25								
										IV	4,9	6,24	127,35								
		Opini BPK								1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc.	1						Faktor Penghambat : - Faktor Pendorong : 1. Telah dibentuknya sistem pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) komponen antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan pada masing-masing SKPD 2. Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sudah mengacu standar akuntansi pemerintah dan sudah memenuhi kriteria pemeriksaan berupa pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan pelaporan tentang pengendalian internal.				
		Satuan	Target Tahunan															I	0	0	0
																		II	1	1	100
																		III	0	0	0
		Prosentase Nilai Aset yang Dapat Diamankan									100						Faktor Penghambat : 1. Masih banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat 2. Sumber daya manusia pengurus barang pada OPD memiliki keterbatasan kapasitas secara pengetahuan dan sering terjadi mutasi pindah/jabatan. Faktor Pendorong : 1. Ketersediaan anggaran yang memenuhi/mencukupi dalam rangka pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab 2. Adanya reward yang cukup kepada pengurus barang OPD sehingga adanya minat untuk menjadi pengurus barang OPD				
		Satuan	Target Tahunan															I	0	0	0
		%	100															II	0	0	0
																		III	0	0	0
										IV	100	81,9	81,9								

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase	KET				
			Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP	I	0	0	0	Faktor Penghambat : 1. Pengumpulan data kinerja masih sering terlambat dan masing-masing unit kerja belum ada kesadaran menyajikan data kinerja sebelum diminta untuk pembuatan laporan 2. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk pemberian reward dan punishment. Faktor Pendorong : 1. Target kinerja telah disusun dengan baik dan terukur; 2. Kegiatan-kegiatan yang disusun pada dokumen Renstra mendukung capaian indikator kinerja 3. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan				
				<table border="1"> <tr> <th>Satuan</th> <th>Target Tahunan</th> </tr> <tr> <td>Nilai</td> <td>77</td> </tr> </table>						Satuan	Target Tahunan	Nilai	77
Satuan	Target Tahunan												
Nilai	77												
					II	77	76,8	99,74					
					III	0	0	0					
					IV	0	0	0					
				Nilai SKM	I	0	0	0		Faktor Penghambat : 1. Waktu pelayanan dan penanganan pengaduan pelayanan yang masih lambat 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang dirasakan masyarakat masih berbelit-belit. Faktor Pendorong : 1. Penambahan sarana prasarana dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan 2. Pelayanan pajak yang bebas biaya.			
				<table border="1"> <tr> <th>Satuan</th> <th>Target Tahunan</th> </tr> <tr> <td>Poin</td> <td>79,5</td> </tr> </table>							Satuan	Target Tahunan	Poin
Satuan	Target Tahunan												
Poin	79,5												
				II	0	0	0						
				III	0	0	0						
				IV	79,5	83,53	105,07						

Cilacap, Desember 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CILICAP

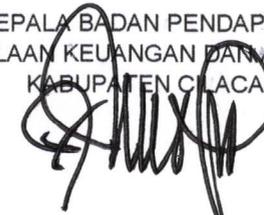
WARSONO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650108 198903 1 009

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
Periode 2018 - 2022
Tahun Anggaran 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK			WTP = 1; WDP = 2; Disc. = 3	1	1	100%
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	19,9	21,24	106,73%
				Opini BPK	1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc.	1	1	100%
				Prosentase Nilai Aset yang Dapat Diamankan	%	100	81,90	81,90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	77	76,80	99,74%
				Nilai SKM	Poin	79,5	83,53	105,07%

Cilacap, Desember 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CILACAP



WARSONO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650108 198903 1 009

LAPORAN CAPAIAN SASARAN DAN ANGGARAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
 Periode 2018 - 2022
 Tahun Anggaran 2022 Bulan Desember

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan / Rumus	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	(%)		Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Opini BPK	1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc. / ABS2	1	1	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.055.602.175	7.684.433.508	95,39%
		Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan	% / SUM	19,9	21,24	106,73%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.046.285.400	10.727.260.758	76,37%
		Prosentase Nilai Aset yang Dapat Diamankan	% / ABS4	100	81,9	81,90%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	10.288.895.200	8.407.419.254	81,71%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai / ABS2	77	76,8	99,74%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	137.564.876.244	126.740.714.250	92,13%
		Nilai SKM	Poin / ABS4	79,5	83,53	105,07%				

Cilacap, Desember 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CILACAP

WARSONO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650108 198903 1 009

**CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Anggaran	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
		Ket	Target		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)												
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77 Nilai																	
	Program Kerja (Program - Kegiatan - SubKegiatan)																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			137.564.876.244	39.101.106.464	28.42	21.861.294.670	22.43	29.654.936.240	21.56	54.266.574.022	45.47	34.126.763.198	24.81	83.666.286.184	77.71	34.683.070.342	25.21	126.740.714.250	97.5
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.812.500	4.912.500	12,66	1.340.900	61,48	-	0	2.767.400	67,04	33.900.000	87,34	36.657.400	97,74	-	0	37.529.900,00	100
	5020120101 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			24.187.500	3.287.500	13,59	1.340.900	66	-	13,59	1.340.900	66	20.900.000	100	22.240.900	100	-	100	23.113.400	100
	5020120107 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.625.000	1.625.000	11,11	-	54	-	11,11	1.416.500	68,75	13.000.000	100	14.416.500	94	-	100	14.416.500	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.383.881.367	8.604.127.967	35,29	4.670.561.204	21,43	6.675.732.375	27,38	10.265.190.442	50	5.983.240.399	24,54	15.463.518.197	79,67	3.120.780.626	12,8	22.643.347.862	100
	5020120201 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.617.228.803	8.604.127.967	35,29	4.670.561.204	21,43	6.675.732.375	62,66	10.265.190.442	50	5.983.240.399	87,2	15.463.518.197	78,57	3.120.780.626	100	22.643.347.862	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.993.183.700	399.922.415	20,6	323.761.172	28	633.866.945	33,48	693.160.886	50	602.901.300	26,56	1.254.370.482	76	366.503.040	19,36	1.847.479.740	100
	5020120602 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			245.830.700	35.163.165	18,14	17.048.900	25	62.917.695	50,6	63.654.320	50	58.134.800	80,59	129.020.040	75	37.615.040	100	181.767.010	100
	5020120604 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			640.290.000	128.030.000	20	121.772.150	25	224.109.000	55	262.023.900	50	160.117.000	80	469.531.200	75	128.034.000	100	635.679.850	100
	5020120605 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			389.047.000	66.824.250	25,8	44.800.400	25	66.824.250	51,59	79.882.100	50	84.549.500	84,23	152.672.000	75	40.849.000	100	233.363.800	100
	5020120609 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			800.016.000	159.905.000	19,99	140.139.722	25	280.006.000	54,99	287.600.566	50	200.100.000	80	503.147.242	75	160.005.000	100	796.469.080	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.409.203.950	3.659.966.000	25,4	-	19,87	401.844.400	2,79	4.044.515.900	27,37	3.694.720.800	25,84	6.078.799.700	81,17	6.652.872.550	46,17	12.214.903.286	88,04
	5020120701 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			7.512.420.950	3.647.466.000	55,69	-	35,08	2.986.500	55,74	3.657.482.500	50	1.540.450.000	79,26	4.360.452.500	85	1.358.633.450	100	5.763.157.417	89,14
	5020120705 - Pengadaan Mebel			853.349.100	-	0	-	5	-	0	-	5	1.230.696.200	52,65	435.933.900	85	1.108.912.100	100	2.268.933.139	100
	5020120706 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-702.918.800	12.500.000	0,23	-	5	398.657.900	7,45	387.033.300	10	923.374.700	24,17	1.282.413.300	75	4.182.812.730	100	4.182.812.730	81,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.826.832.800	6.672.208.200	24,87	5.836.086.234	25	6.711.458.200	25,02	11.804.551.928	50	6.662.286.200	24,83	18.395.424.675	75	6.780.880.200	25,28	25.545.500.668	100
	5020120802 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.662.295.000	6.175.473.750	24,91	5.652.051.730	25	6.175.473.750	49,82	11.216.500.372	50	6.156.301.750	74,65	17.407.847.567	75	6.285.045.750	100	23.885.844.451	100
	5020120804 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.014.537.800	496.734.450	24,42	183.004.504	25	535.984.450	50,76	588.051.556	50	505.984.450	75,63	987.577.108	75	495.834.450	100	1.659.656.214	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.230.523.905	219.416.150	17,83	99.897.925	24,86	404.778.200	32,89	323.110.555	61,08	186.932.800	15,1	604.372.628	82,53	420.498.755	34,17	1.081.595.672	100
	5020120901 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			305.821.155	136.705.300	24,95	77.532.825	25	169.205.300	55,84	194.250.555	50	101.080.300	74,29	304.434.628	75	140.830.255	100	479.037.672	100
	5020120906 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			74.650.000	26.752.850	23,01	6.630.000	25	36.956.150	54,79	30.980.000	50	21.942.500	73,67	63.405.000	75	30.618.500	100	101.820.000	100
	5020120909 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			145.182.750	49.208.000	9,03	15.735.000	25	185.544.750	43,06	94.130.000	75	61.380.000	54,32	222.083.000	92	249.050.000	100	481.288.000	100
	5020120911 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			48.750.000	6.750.000	31,76	-	16,67	13.070.000	93,27	3.750.000	50	1.430.000	119,74	14.450.000	75	-	100	19.450.000	100
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Opini BPK	1 = WTP, 2 = WDP, 3 = Disc.																	
	Program Kerja (Program - Kegiatan - SubKegiatan)																			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			8.055.602.175	1.113.891.000	13,83	494.486.868	20,5	2.048.846.250	25,43	1.648.007.868	39,8	3.428.186.025	42,56	3.459.789.768	73,64	1.464.678.900	18,18	7.684.433.508	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.480.219.850	288.398.000	19,48	119.753.200	20,73	399.746.250	27,01	402.214.400	43,78	523.617.150	35,37	591.869.400	76,44	268.458.250	18,14	1.407.996.800	100
	5020220101 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			58.592.000	-	0	-	0	-	0	-	0	58.592.000	100	17.418.000	70	-	100	53.058.000	100
	5020220102 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			63.891.200	-	0	-	0	-	0	-	0	63.891.200	100	23.536.500	70	-	100	58.563.000	100
	5020220107 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			188.702.400	69.450.000	47,08	62.046.000	50	-	47,08	62.046.000	50	48.850.000	80,2	104.088.000	100	29.200.000	100	143.346.000	100
	5020220108 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			122.133.800	-	0	-	0	-	0	-	0	134.136.200	82,12	41.433.000	50	29.200.000	100	159.064.500	100
	5020220109 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			190.869.750	4.185.750	2,19	11.371.400	10	186.684.000	100	98.322.200	76,66	-	100	108.271.300	90	-	100	183.933.650	100
	5020220111 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			800.030.500	214.762.250	25,09	46.335.800	25	213.062.250	49,98	241.846.200	50	218.147.750	75,46	297.122.600	75,33	210.058.250	100	810.031.650	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			441.907.900	35.180.000	7,96	20.733.200	24,52	162.582.500	38,79	101.954.100	55,47	203.570.400	46,07	276.991.600	88,13	40.575.000	9,18	428.842.000	100
	5020220203 - Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			127.568.300	12.592.500	9,87	5.875.000	30,18	55.673.800	53,51	18.349.200	62,13	59.302.000	100	59.544.200	100	-	100	124.251.600	100
	5020220205 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			69.582.500	5.500.000	7,9	1.905.000	25	38.800.000	63,67	14.152.000	62,5	25.282.500	100	41.161.000	100	-	100	66.193.000	100
	5020220206 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			244.757.100	17.087.500	6,98	12.953.200	21,43	68.108.700	34,81	69.352.900	50	118.985.900	83,42	176.286.400	78,57	40.575.000	100	239.397.400	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			763.073.175	47.719.000	6,25	24.342.556	17,72	120.620.000	15,81	45.267.456	22,3	415.541.125	54,46	284.402.256	59,82	179.193.050	23,48	723.638.036	100
	5020220302 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			65.689.000	2.169.000	3,3	-	25	5.120.000	11,1	2.503.000	42	58.400.000	100	61.573.900	75	-	100	65.583.880	100
	5020220304 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			237.563.800	45.550.000	19,17	24.342.556	50	108.500.000	64,85	42.764.456	60	70.400.000	94,48	170.952.356	99	13.113.800	100	236.282.556	100
	5020220310 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			107.505.375	-	0	-	0	2.000.000	1,86	-	0	105.505.375	100	-	5	-	100	95.357.400	100
	5020220311 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			352.315.000	-	0	-	0	5.000.000	1,42	-	0	181.235.750	52,86	51.876.000	50	166.079.250	100	326.415.200	100
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			10.288.895.200	1.887.794.325	18,35	225.371.244	20,5	2.500.216.925	24,3	1.799.586.238	39,8	2.617.733.425	25,44	3.822.158.058	73,64	3.283.150.525	31,91	8.407.419.254	100
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			10.288.895.200	1.887.794.325	18,35	225.371.244	14,21	2.500.216.925	24,3	1.799.586.238	44,09	2.617.733.425	25,44	3.822.158.058	72,31	3.283.150.525	31,91	8.407.419.254	83,39

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Anggaran	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
		Ket	Target		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
5020320101	- Penyusunan Standar Harga			215.769.700	11.250.000	5,21	2.250.000	15	29.200.000	18,75	52.400.000	100	6.745.000	21,87	54.900.000	100	168.574.700	100	165.058.000	100
5020320105	- Penatausahaan Barang Milik Daerah			113.700.000	17.137.500	15,07	17.128.250	20	5.237.500	19,68	17.128.250	50	45.537.500	59,73	87.612.500	90	45.787.500	100	113.600.000	100
5020320106	- Inventarisasi Barang Milik Daerah			4.450.312.500	1.048.670.625	23,56	8.010.000	10	1.061.870.625	47,42	1.059.457.000	50	1.236.100.625	75,2	2.095.427.000	75,2	1.103.670.625	100	4.245.462.500	100
5020320107	- Pengamanan Barang Milik Daerah			1.378.841.000	599.993.000	15,88	38.757.394	15	905.012.500	39,84	427.677.688	40	1.122.435.500	69,56	1.057.689.908	70	1.149.980.000	100	2.266.974.204	82
5020320109	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.400.000	20.680.000	27,8	-	25	16.120.000	49,46	26.680.000	100	1.600.000	51,61	29.050.000	100	36.000.000	100	58.100.000	100
5020320110	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			488.698.000	190.063.200	12,6	159.225.600	25	482.516.300	44,58	216.243.300	30	204.790.800	58,15	497.478.650	70	631.327.700	100	1.430.755.550	100
5020320113	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			148.594.000	-	0	-	0	260.000	0,17	-	0	524.000	0,53	-	0	147.810.000	100	127.469.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				14.046.285.400	771.605.600	5,49	208.998.900	20,6	1.454.851.400	10,36	502.143.476	39,6	7.447.333.900	53,02	3.069.059.184	73,64	4.372.494.500	31,13	10.727.280.758	100
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				7.023.142.700	385.802.800	5,49	104.499.450	27,06	727.425.700	10,36	251.071.738	31,15	3.723.666.950	53,02	1.534.528.582	59,37	2.186.247.250	31,13	5.363.630.379	86,97
5020420102	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			142.031.450	6.733.250	4,74	600.000	0	50.000.000	39,94	4.622.750	0	61.600.000	83,31	66.611.045	44,23	23.698.200	100	95.909.245	69,5
5020420103	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1.623.089.500	68.687.250	2,68	50.447.250	50	-	2,68	51.347.250	50	2.080.464.750	83,85	337.641.970	50	414.062.500	100	1.812.574.220	95,5
5020420105	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			2.912.721.000	67.266.250	2,66	37.067.200	0	132.090.050	7,88	104.772.850	11,3	1.110.246.800	51,79	673.922.050	59,48	1.218.835.900	100	1.964.934.050	88,95
5020420106	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			604.700.000	14.373.950	2,38	-	0	48.330.300	10,37	13.729.850	0	102.328.200	27,29	112.210.134	66,66	439.867.550	100	525.278.934	100
5020420107	- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesain dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			329.438.600	145.108.950	88,94	-	50	12.189.350	96,41	10.231.000	50	12.792.350	104,25	58.658.050	100	-6.929.250	100	136.277.500	100
5020420110	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			635.912.000	-	0	-	75	450.940.000	71,34	32.545.500	82,33	182.712.000	100,25	224.644.500	93,67	-1.580.000	100	570.940.000	100
5020420111	- Penagihan Pajak Daerah			252.741.200	18.300.000	7,24	6.175.000	25	33.876.000	20,64	23.612.538	0	111.222.850	64,65	47.791.833	33,25	89.342.350	100	180.334.080	100
5020420113	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			964.908.150	65.333.150	47,76	10.210.000	0	-	47,76	10.210.000	13,33	62.300.000	93,31	13.050.000	57,5	9.150.000	100	77.382.350	100

Cilacap, Desember 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP

WARSONO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009

**Perbandingan Target Kinerja Tahun (Berjalan) dengan Target Akhir RPJMD
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)
Periode 2018 - 2022**

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian/Kondisi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022	Capaian 2022 terhadap 2022 (AKHIR Renstra) (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah						
-	Opini BPK	1	1	1	100	1	100
1.1.1	<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah</i>						
1.1.1.1.2	Opini BPK	1	1	1	100	1	100
	<p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dibentuknya sistem pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) komponen antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan pada masing-masing SKPD Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sudah mengacu standar akuntansi pemerintah dan sudah memenuhi kriteria pemeriksaan berupa pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaporan tentang pengendalian internal. 						
	<p>Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Mengaplikasikan software pengelolaan keuangan yang terintegrasi di semua SKPD Melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan barang daerah Meningkatkan koordinasi diantara pengelola keuangan dan aset di SKPD yaitu bendahara, petugas akuntansi, dan pengurus barang untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. 						
1.1.1.1.3	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	83,2	100	81,9	81,90	100	81,9
	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat. Sumber daya manusia pengurus barang pada SKPD/OPD memiliki keterbatasan kapasitas secara pengetahuan dan sering terjadi mutasi pindah/jabatan. 						
	<p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan anggaran yang memenuhi/mencukupi dalam rangka pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab Adanya reward yang cukup kepada pengurus barang OPD sehingga adanya minat untuk menjadi pengurus barang OPD 						
	<p>Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengalokasikan anggaran pensertifikatan secara bertahap serta pendampingan dengan Korsupgah Mengadakan peningkatan kapasitas pengurus barang secara berkala dan berkelanjutan serta mengadakan rekon laporan mutasi barang setiap 6 bulan sekali 						
1.1.1.1.1	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	22,17	19,9	21,24	106,73	19,9	106,73
	<p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait pelaksanaan pemungutan PAD Sistem reward yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD 						

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian/Kondisi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2022	Capaian 2022 terhadap 2022 (AKHIR Renstra) (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : 1. Membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPSTP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan penertiban. 2. Penilaian NJOP PBB 3. Penggunaan aplikasi terintegrasi, baik dalam pelayanan, pembayaran, dan pelaporan sehingga semakin memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan						
1.1.2	<i>Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah</i>						
1.1.1.2.4	Nilai AKIP SKPD	76,48	77	76,8	99,74	77	99,74
	Faktor Penghambat : 1. Pengumpulan data kinerja masih sering terlambat dan masing-masing unit kerja belum ada kesadaran menyajikan data kinerja sebelum diminta untuk pembuatan laporan 2. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk pemberian reward dan punishment.						
	Faktor Pendorong : 1. Target kinerja telah disusun dengan baik dan terukur 2. Kegiatan-kegiatan yang disusun pada dokumen Renstra mendukung capaian indikator kinerja 3. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : 1. Melakukan perbaikan indikator kegiatan (output) dan kegiatan yang lebih prioritas untuk mendukung mencapai indikator program dengan melakukan evaluasi Renstra.						
1.1.5	Nilai SKM	80,91	79,5	83,53	105,07	79,5	105,07
	Faktor Penghambat : 1. Waktu pelayanan dan penanganan pengaduan pelayanan yang masih lambat 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang dirasakan masyarakat masih berbelit-belit.						
	Faktor Pendorong : 1. Penambahan sarana prasarana dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan 2. Pelayanan pajak yang bebas biaya.						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : 1. Melakukan inovasi pelayanan di bidang keuangan, pendapatan, dan aset 2. Melakukan penyempurnaan SOP dalam rangka percepatan pelayanan						

Cilacap, Desember 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP

WARSONO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2022 Bulan Desember

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>=90,1%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan	106,73	76,37	30,36
		Opini BPK	100	95,39	4,61
		Prosentase Nilai Aset yang Dapat Diamankan	81,90	81,71	0,19
2	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah	Nilai AKIP SKPD	99,74	96,69	3,05
		Nilai SKM	105,07	92,13	12,94

Cilacap, Desember 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP



WARSONO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009